



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

**Sekretariat Jenderal Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus**



Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing				
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki rasio pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan wilayah (per pulau / provinsi) > 1	Jumlah KEK	4 KEK	18 KEK	100%
1.2	Indikator 1.2 Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang difasilitasi dan dikembangkan	Jumlah KEK	19 KEK	20 KEK	100%
II	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
2.1	Indikator 2.1 Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	nilai	3 (skala 4)	3,58	$\frac{\text{Index Realisasi}}{\text{Target Capaian}} \times 100\% = 119,33\%$
IV	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik				
3.1	Indikator 3.1 Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	nilai	3 (skala 4)	3,11	$\frac{\text{Index Realisasi}}{\text{Target Capaian}} \times 100\% = 103,67\%$

Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 1, yaitu terwujudnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator berikut:

1. Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki rasio pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan wilayah (per pulau/provinsi) > 1
2. Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang difasilitasi dan dikembangkan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Memiliki Rasio Pertumbuhan Investasi Terhadap Pertumbuhan Wilayah (per pulau / provinsi) > 1

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan investasi dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK perlu didukung oleh infrastruktur baik dalam maupun luar kawasan dan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan, sehingga KEK tersebut dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan target perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu rasio pertumbuhan investasi Kawasan (KEK/KI/KSPN) terhadap laju pertumbuhan wilayah (per pulau/provinsi) memiliki nilai lebih dari 1. Maka untuk mencapai target rasio yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, laju pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus, KI dan KSPN harus lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan wilayah. Pada RPJMN telah ditetapkan bahwa jumlah KEK yang dinyatakan berdaya saing pada Tahun 2023 berjumlah 4 KEK.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2023 ini ditetapkan sebanyak 4 KEK dengan nilai >1 dalam 1 tahun, dimana target tahun 2023 ini didasarkan pada Renstra Kemenko Perekonomian 2020-2024.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki rasio pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan wilayah (per pulau / provinsi) > 1	Jumlah KEK	4 KEK	18 KEK	100%

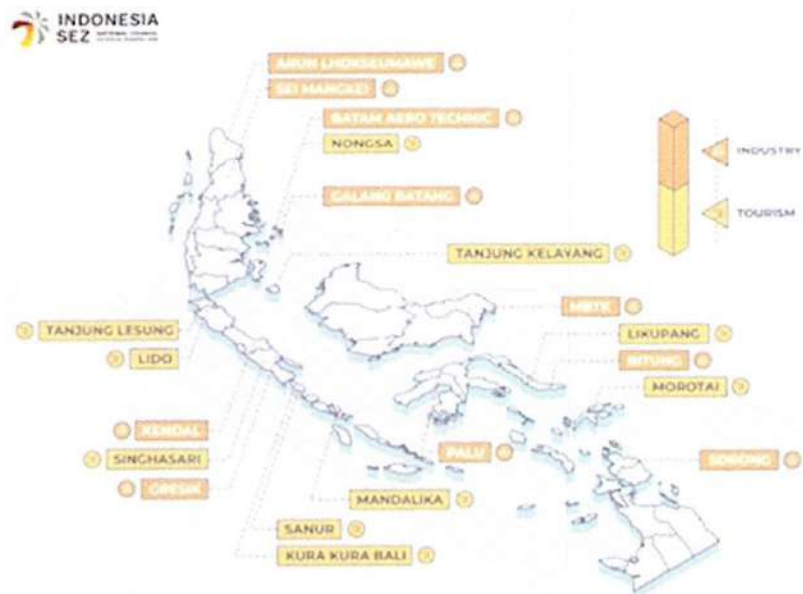
Dari pencapaian target tersebut, dilakukan pula perhitungan nilai laju pertumbuhan investasi dan rasio laju pertumbuhan investasi yang digunakan sebagai bahan untuk memonitoring perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus dalam berkontribusi pada perekonomian nasional dan wilayah. Nilai tersebut didapatkan dari formula perhitungan berikut,

$$L = \frac{I_n - I_{n-1}}{I_{n-1}} \quad \longrightarrow \quad R = \frac{L_k}{L_w}$$

dimana,

- L = Laju Pertumbuhan Investasi
- I_n = Nilai Investasi Tahun Tertentu
- I_{n-1} = Nilai Investasi Tahun Sebelumnya
- R = Rasio Laju Pertumbuhan Investasi
- L_k = Laju Pertumbuhan Investasi Kawasan
- L_w = Laju Pertumbuhan Investasi Wilayah

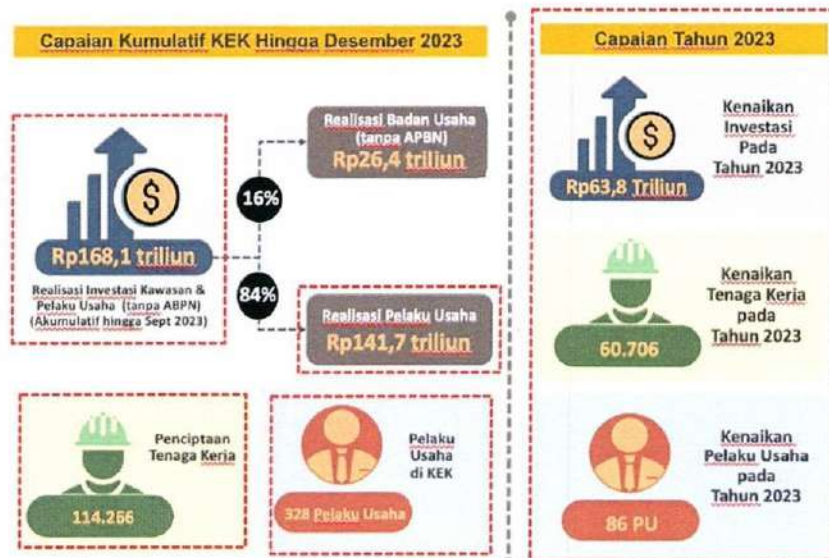
Target mencapai 4 KEK akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Maka untuk mendapatkan perhitungan target tersebut diperlukan juga data pertumbuhan investasi wilayah yang diperoleh dari BPS yang akan di release pada awal tahun berikutnya.



Gambar 1. Sebaran KEK di Indonesia

Hingga tahun 2023, telah terdapat 20 KEK ditetapkan yang tersebar di seluruh Indonesia. KEK yang telah ditetapkan tersebut antara lain:

1. KEK Arun Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Aceh
2. KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
3. KEK Batam Aero Technic, Kota Batam, Kepulauan Riau
4. KEK Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau
5. KEK Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
6. KEK Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung
7. KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten
8. KEK Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
9. KEK Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
10. KEK Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
11. KEK Singhasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur
12. KEK Sanur, Kota Denpasar, Bali
13. KEK Kura Kura Bali, Kota Denpasar, Bali
14. KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
15. KEK MBTK, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
16. KEK Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah
17. KEK Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
18. KEK Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara
19. KEK Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara
20. KEK Sorong, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya



Gambar 2. Capaian Investasi dan Tenaga Kerja KEK Tahun 2023

Berdasarkan data yang telah dimonitor dan dikompilasi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, capaian akumulasi realisasi investasi kawasan & Pelaku Usaha (tanpa APBN) hingga Desember 2023 telah mencapai Rp 168,1 Triliun. Berdasarkan data, akumulasi realisasi investasi hingga Triwulan IV adalah sebesar 84% dari realisasi Pelaku Usaha dengan jumlah total Rp 141,7 Triliun, dan sebesar 16% dari Realisasi Badan Usaha (tanpa APBN) dengan jumlah total Rp 26,4 Triliun. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh KEK telah berhasil menyerap sebanyak 114.266 tenaga kerja dengan jumlah pelaku usaha mencapai 328 Pelaku Usaha di KEK.

Sepanjang tahun 2023, Kawasan Ekonomi Khusus telah berhasil meningkatkan investasi sebesar Rp 63,8 Triliun, dengan laju kenaikan Pelaku Usaha sebanyak 86 PU, dan kenaikan tenaga kerja pada Tahun 2023 sejumlah 60.706 tenaga kerja.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pelaksanaan rencana aksi pada sasaran program terwujudnya pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berdaya saing ini memiliki inisiatif strategis untuk melakukan monitoring dan evaluasi peningkatan investasi Kawasan Ekonomi Khusus.

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Penyusunan laporan rasio laju pertumbuhan tahunan	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan laporan terkait dengan rasio pertumbuhan investasi terhadap laju pertumbuhan wilayah di masing-masing KEK

Titik-titik pertumbuhan KEK diharapkan dapat menggerakkan perekonomian wilayah. Adapun RPJMN 2020-2024 menargetkan agar rasio laju pertumbuhan KEK terhadap wilayah (pulau/provinsi) dapat lebih dari satu. Dengan demikian investasi KEK tidak hanya ditargetkan untuk tumbuh, tetapi pertumbuhannya juga ditargetkan harus lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan wilayahnya.

Pada Tahun 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah berkolaborasi dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Bisnis, Universitas Indonesia, untuk menghitung dampak ekonomi dari Kawasan Ekonomi Khusus pada wilayah sekitarnya. Dari hasil temuan tim Penyelidik, telah didapatkan data rasio laju pertumbuhan investasi, tenaga kerja, dan perbandingan akumulasi Nilai Transaksi Bruto (NTB) yang dibagi dengan akumulasi PDRB Provinsi. Tingkat kontribusi KEK yang dimaksud adalah mengenai percepatan investasi, tenaga kerja, dan penciptaan nilai tambah di provinsi masing-masing lokasi KEK. Dari hal tersebut, KEK dibentuk dengan maksud untuk mempercepat investasi dan nilai tambah ekonomi (PDB).

Tabel 1. Rasio Pertumbuhan Investasi Terhadap Pertumbuhan Wilayah

No	KEK	Rasio dan Kontribusi			
		Investasi	Tenaga Kerja	Laju NTB	NTB/PDRB (%)
1	Sorong	1.016	1.023	0.124	0.001
2	Morotai	0.894	2.027	0.450	0.027
3	Bitung	1.523	1.731	0.808	0.062
4	MBTK	1.380	1.195	1.044	0.002
5	Tanjung Kelayang	1.413	1.811	0.317	0.011
6	Tanjung Lesung	1.120	1.210	0.896	0.019
7	Lido	1.683	4.118	0.961	0.030
8	Likupang	1.241	4.122	0.178	0.023
9	Arun Lhokseumawe	1.977	1.271	0.479	0.006
10	Sei Mangkei	1.120	1.350	1.100	0.302
11	Galang Batang	1.017	1.074	1.232	1.109
12	Palu	1.212	1.580	0.995	0.019
13	Batam Aero Technic	1.362	1.076	0.775	0.032
14	Kendal	1.612	1.476	1.472	0.267
15	Mandalika	2.683	1.462	1.148	0.260
16	Kura Kura Bali	0.000	0.981	0.000	0.100
17	Nongsa	1.010	1.215	1.130	0.060
18	Gresik	1.392	1.205	1.698	0.277
19	Sanur	1.331	2.126	0.890	0.153
20	Singhasari	1.178	1.004	1.698	0.018

Target pertumbuhan investasi wilayah pada akhir tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMN, Rencana Strategis, dan juga Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK adalah sebanyak 4 KEK. Berdasarkan hasil kajian tersebut, rasio laju pertumbuhan KEK dengan nilai lebih dari 1 dibandingkan dengan rasio laju pertumbuhan provinsi lokasi KEK adalah berjumlah 18 KEK. Hal tersebut merupakan capaian yang tinggi yang telah berhasil diberikan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Sedangkan, Kawasan Ekonomi Khusus yang saat ini memiliki dampak rasio investasi yang lebih rendah dari pertumbuhan investasi provinsi, yaitu KEK Morotai. Sedangkan KEK Kura Kura Bali sendiri baru saja ditetapkan pada bulan April 2023 lalu, sehingga pertumbuhan investasi yang ada masih sangat terbatas. Nilai capaian realisasi investasi dan tenaga kerja pada masing-masing KEK pada Tahun 2023 serta target capaian investasi dan tenaga kerja masing-masing KEK pada Tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja TA 2023 dan Target Capaian Investasi dan Tenaga Kerja TA 2024

No	KEK	Capaian Kumulatif Investasi	Realisasi Investasi TA 2023 (Milliar Rupiah)	Realisasi TK TA 2023	Target Investasi TA 2024 (Milliar Rupiah)	Target TK TA 2024
1	KEK Tanjung Lesung	2.481	309,69	770	682	9.205
2	KEK Sei Mangkei	13.950	3.783,20	214	5.319	1.200
3	KEK Palu	773	402,13	55	2.106	1.050
4	KEK Bitung	1.535	443,08	277	1.635	720
5	KEK Morotai	562	119,00	153	155	400
6	KEK Mandalika	4.930	690,82	13.391	950	144
7	KEK MBTK	100	88,83	122	73,42	93
8	KEK Tanjung Kelayang	1.721	18,00	121	626,6	1.520
9	KEK Sorong	272	3,41	0	1.577,7	540
10	KEK Arun Lhokseumawe	4.855	66,37	26	786	315
11	KEK Galang Batang	18.105	479,35	1.168		
12	KEK Singhasari	1.146	869,79	6	367	870
13	KEK Likupang	509,10	66,80	709	175,17	
14	KEK Kendal	41.800	20.888,69	18.095	17.700	
15	KEK Nongsa	2.752,53	437,08	2.190	413	346
16	KEK Lido	4.180	1.268,46	2.398	882,03	1.152
17	KEK Gresik	65.659,47	32.141,82	19.000	28.935,6	1.258
18	KEK Batam Aero Technic	797	230	506	673	300
19	KEK Sanur	2.061,50	980,66	1.315	1.380	1.600
20	KEK Kura Kura Bali	4,83	537,37	190	67,66	741
TOTAL		168.197,38	63.824,56	60.706	64.504,68	36.994

Secara lebih lanjut, pada setiap Kawasan Ekonomi Khusus juga menemui berbagai kendala maupun isu strategis dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan KEK. Dimana rincian mengenai capaian dan isu strategis, serta tindak lanjut pada masing-masing KEK tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian, Isu Strategis, dan Tindak Lanjut KEK

No	KEK	Isu dan Rencana Tindak Lanjut
1.	KEK Galang Batang	<p>a. Akumulasi capaian hingga tahun 2023 di KEK Galang Batang telah mencapai realisasi investasi sebanyak Rp 18,03 Triliun. Investasi BUPP adalah sebesar Rp 201,38 Miliar dan Rp 17,82 Triliun dari Pelaku Usaha yang sudah berinvestasi di KEK Galang Batang.</p> <p>b. Realisasi penyerapan tenaga kerja kumulatif hingga 2023 adalah sebanyak 4.547 orang, dengan capaian di tahun 2023 sebanyak 1.168 tenaga kerja (sebesar 61,47% dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan sebesar 1.900 orang).</p> <p>c. Pelaku Usaha KEK Galang Batang pada tahun 2023 telah bertambah 5 Pelaku Usaha, yakni PT Bintang Electrolytic Aluminium, PT BINTAN SKY ENERGY, PT Befar Evertrust Indonesia, PT Hidayah Teknik Indomas, dan PT Solid Petro Indonesia. Seluruh Pelaku Usaha baru tersebut telah masuk ke dalam modul pelaku usaha pada sistem aplikasi KEK.</p> <p>d. PT GBKEK selaku BUPP KEK Galang Batang sedang melakukan pemenuhan delineasi lahan yang pada saat ini telah menguasai 1.800 Ha dari total luas lahan 2.333,6 Ha sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2017.</p> <p>e. Rencana bisnis tahun 2024 ditargetkan untuk mencapai peningkatan investasi sebesar Rp 13,2 Triliun dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pabrik caustic soda senilai Rp 5 Triliun • Recycling industry senilai Rp 1,6 Triliun • Industri aluminium ingot senilai Rp 3,3 Triliun • Peningkatan kapasitas produksi alumina dari 2 juta

		ton per tahun menjadi 4 juta ton per tahun, senilai Rp 3,3 Triliun
2.	KEK Sei Mangkei	<p>a. Akumulasi capaian di KEK Sei Mangkei hingga tahun 2023, telah mencapai realisasi investasi sebanyak Rp 11,53 Triliun dari 21 Pelaku Usaha yang sudah berinvestasi di KEK Sei Mangkei.</p> <p>b. Realisasi penyerapan tenaga kerja kumulatif hingga 2023 sebanyak 2.326 orang dengan capaian di tahun 2023 sebanyak 113 tenaga kerja (sebanyak 7,51% dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan sebesar 113 orang).</p> <p>c. Rencana bisnis tahun 2024 ditargetkan untuk mencapai peningkatan investasi sebesar Rp 5,31 Triliun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.200 orang.</p> <p>d. BUPP KEK Sei Mangkei meminta dukungan berupa penerbitan izin operasional <i>dryport</i>, perumahan untuk KEK Sei Mangkei, Tempat Pembuangan Akhir Limbah Padat (Non B3), Kota Baru Sei Mangkei, aksesibilitas menuju KEK Sei Mangkei, dan harga gas.</p> <p>e. Selain itu Administrator KEK Sei Mangkei juga menyebutkan masih terdapat permasalahan di KEK Sei Mangkei yang berupa kesulitan pada implementasi perpajakan, pertanahan, lingkungan, pengajuan Kawasan Pabean, dan <i>estate regulation</i> di KEK Sei Mangkei.</p> <p>f. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi menyampaikan bahwa capaian KEK Sei Mangkei saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan pada 2022, maka dari itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di KEK Sei Mangkei.</p> <p>g. Rencana tindak lanjut: perlu diagendakan pertemuan dengan</p>

		Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk membahas implementasi perpajakan di KEK Sei Mangkei.
3.	KEK Nongsa	<p>a. Capaian investasi kumulatif di KEK Nongsa hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,75 Triliun yang terdiri dari investasi Badan Usaha sebesar Rp 800 Miliar dan Pelaku usaha sebesar Rp 1,95 Triliun.</p> <p>b. Capaian investasi tahun 2023 meningkat sebanyak Rp 435,2 Miliar (sebesar 76,3% dari investasi yang ditargetkan yaitu Rp 570,4 Miliar).</p> <p>c. Realisasi penyerapan tenaga kerja kumulatif hingga 2023 adalah sebanyak 4.345 orang dengan jumlah Pelaku Usaha sebanyak 18. Sementara capaian di tahun 2023 untuk realisasi penyerapan tenaga kerjanya adalah sebanyak 2.190 tenaga kerja (sudah lebih 100% dari yang jumlah penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan sebesar 301 orang). Peningkatan jumlah tenaga kerja ini termasuk dengan pelajar yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan di KEK Nongsa.</p> <p>d. Rencana kerja tahun 2024 ditargetkan untuk peningkatan capaian investasi sebesar Rp 413 Miliar dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 346 orang.</p> <p>e. Target peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja yang dimaksud adalah untuk mendukung pembangunan kawasan oleh BUPP, diantaranya untuk pembangunan infrastruktur jalan, drainase, pemadam kebakaran, trench listrik, dan PJU. Selain itu adalah untuk investasi dari pelaku usaha data center, diantaranya adalah dari Data Center First Nongsa One, GDS, Pusat Data Nasional oleh Kominfo, Princeton Digital Group</p>

		<p>(PDG), serta investasi dibidang digital dari PT Citranet Sarana Digital, investasi untuk Kawasan komersial dari PT Citra Sinar Global (CSG) dan untuk investasi penyediaan listrik dari PT Sarana Tamarin Power (STP).</p> <p>f. Rencana tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu strategi lebih lanjut untuk pengembangan KEK Nongsa dengan adanya kompetisi dengan Johor Malaysia • Perlu adanya penetapan tarif listrik di Batam khususnya untuk tarif bagi investasi Data Center • Pembahasan internal dengan BP Batam untuk alokasi lahan perluasan lahan KEK Nongsa
4.	KEK Arun Lhokseumawe	<p>a. Capaian investasi KEK Arun Lhokseumawe hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 4,85 Triliun yang terdiri dari investasi Badan Usaha sebesar Rp 15,26 Miliar dan Pelaku Usaha sebesar Rp 4,84 Triliun.</p> <p>b. Realisasi penyerapan tenaga kerja kumulatif hingga 2023 sebanyak 1.530 orang dengan capaian di tahun 2023 sebanyak 26 orang dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan sebesar 327 orang.</p> <p>c. BUPP menyampaikan isu strategisnya adalah terkait kelembagaan dan penyertaan modal di KEK Arun Lhokseumawe.</p> <p>d. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan BUPP yaitu BUPP akan memonitor terkait progres Kajian Kelayakan Pengembangan Bisnis dan Pendampingan Implementasi Model Bisnis PT Patriot Nusantara Aceh yang dilakukan oleh Danareksa dan Pemegang Saham Patriot (PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelabuhan</p>

		<p>Indonesia, PT Pertamina, dan PT Pembangunan Aceh).</p> <p>e. Rencana bisnis tahun 2024 ditargetkan untuk mencapai peningkatan investasi sebesar Rp 786 Miliar dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Project Revitalisasi Pabrik H2O2 (PT Pupuk Iskandar Muda) – Lanjutan 2023 senilai Rp 37 Miliar; • Pertambangan Gas Alam & Minyak Bumi (PT Pema Global Energi) senilai Rp 164 Miliar; • Revitalisasi Tangki Condensate (PT Pembangunan Aceh) senilai Rp 50 Miliar; • Revitalisasi Tangki LNG F-6004 (PT Perta Arun Gas) senilai Rp 535 Miliar.
5.	KEK Batam Aero Technic (BAT)	<p>a. Capaian investasi kumulatif KEK BAT hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 797 Miliar dengan peningkatan capaian investasi di tahun 2023 sebanyak Rp 230 Miliar (sebesar 74,19% dari investasi yang ditargetkan tahun 2023 sebesar Rp 310 Miliar).</p> <p>b. Realisasi penyerapan tenaga kerja kumulatif hingga 2023 sebanyak 1.910 orang, dengan jumlah Pelaku Usaha adalah 1, karena untuk di KEK BAT ini sendiri BUPP KEK masih sebagai Pelaku Usaha. Sementara capaian di tahun 2023 untuk realisasi penyerapan tenaga kerjanya adalah sebanyak 506 tenaga kerja.</p> <p>c. Peningkatan ini sudah melebihi 2 kali lipat (lebih dari 200%) dari jumlah tenaga kerja yang ditargetkan yaitu 300 orang.</p> <p>d. Rencana kerja tahun 2024 ditargetkan untuk dapat meningkatkan capaian investasi sebesar Rp 673 Miliar dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 300 orang.</p>

		<p>e. Target peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja yang dimaksud adalah untuk pembangunan hanggar F dan H (hanggar tahap 4) dan penambahan kapasitas cabin <i>furnishing shop</i>.</p> <p>f. Dengan adanya penambahan hanggar F dan H ini nantinya akan dapat menambah kapasitas 24 pesawat untuk dilayani perbaikan dan perawatannya.</p> <p>g. Rencana tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu percepatan penetapan Perka BP Batam agar dapat mengakomodir KEK BAT dapat melakukan aksi korporasi dengan pihak ketiga (terkait perjanjian sewa lahan dengan pihak ketiga). • Pembahasan lebih lanjut terkait implementasi fasilitas dan kemudahan bagi KEK MRO. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perubahan PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK. • Diperlukan adanya kepastian alokasi lahan dari BP Batam untuk perluasan lahan KEK BAT.
6.	KEK Tanjung Kelayang	<p>a. Capaian investasi KEK Tanjung Kelayang hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 1,7 Triliun yang terdiri dari investasi Badan Usaha sebesar Rp 1,17 Triliun dan Pelaku usaha sebesar Rp 541 Miliar.</p> <p>b. Realisasi tenaga kerja sebanyak 609 orang, dengan jumlah Pelaku Usaha sebanyak 10 Pelaku Usaha.</p> <p>c. Pencapaian target investasi dan tenaga kerja pada tahun 2023 sedikit sulit terpenuhi, yang hanya mencapai Rp 18 Miliar dan 121 tenaga kerja, karena terdapat pengurangan jumlah</p>

		<p>penerbangan menuju Pulau Belitung.</p> <p>d. Target investasi tersebut sangat bergantung dari penambahan jumlah penerbangan dan penambahan layanan maskapai premium menuju Belitung.</p> <p>e. Rencana tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar Rp 626,6 Miliar untuk capaian investasi dan 1.520 orang untuk capaian tenaga kerja. • Beberapa proyek yang akan dikembangkan ke depannya adalah peningkatan Hotel Sheraton menjadi Luxury Collection, Club House Bimasena, dan Pembangunan Hotel Azicas. • Usulan penambahan jumlah penerbangan dapat dilakukan dengan membuka koridor penerbangan baru, yaitu Surabaya-Belitung-Batam dan sebaliknya, sehingga dengan asumsi 1 (satu) persen dari 500 ribu penumpang yang menuju Bali akan melakukan perjalanan lanjutan menuju Belitung.
7.	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	<p>a. Capaian investasi KEK MBTK hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 100 Miliar yang terdiri dari investasi Badan Usaha sebesar Rp 0,25 Miliar dan Pelaku usaha sebesar Rp 99,75 Miliar.</p> <p>b. Realisasi tenaga kerja sebanyak 122 orang, dengan jumlah Pelaku Usaha sebanyak 2 Pelaku Usaha.</p> <p>c. Pencapaian target investasi pada tahun 2023 belum dapat terpenuhi, yang hanya mencapai Rp 88,7 Miliar dari targetnya Rp 94 Miliar atau sebesar 94,41%.</p> <p>d. Sedangkan capaian tenaga kerja pada tahun 2023 sebesar 122</p>

		<p>orang telah memenuhi target. Sebagai catatan target tersebut masih rendah dibandingkan KEK lain dengan sektor manufaktur.</p> <p>e. Keadaan tersebut dikarenakan masih dilakukan perbaikan manajemen operasional, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perubahan status PT MBTK menjadi BUMD yang akan menjadi kolaborasi BUMD Kalimantan Timur dan BUMD Kutai Timur, dan nantinya akan menjadi pengelola seluruh aset di kawasan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.• Penyelesaian izin operasional Pelabuhan Multipurpose Maloy yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim masih berproses di lintas K/L.• Perbaikan dan peningkatan utilitas di dalam kawasan seperti air baku. <p>f. Rencana tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Target investasi pada tahun 2024 sebesar Rp 73,42 Miliar dan serapan tenaga kerja sebesar 93 orang. Hal ini masih dapat ditingkatkan kembali dengan melakukan promosi dan menambah Pelaku Usaha, khususnya anchor investor.• PT MBTK perlu menyelesaikan berbagai tantangan, seperti perubahan BUMD, penyelesaian izin operasional Pelabuhan Maloy, dan peningkatan layanan kawasan dari sisi utilitas.• Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memohon dukungan koordinasi
--	--	---

		bersama K/L dalam hal penyelesaian perizinan.
8.	KEK Sorong	<p>a. Komitmen investasi Pelaku Usaha KEK Sorong adalah sebesar Rp 20,5 Triliun dengan realisasi akumulatif hingga Desember adalah sebesar Rp 272,21 Miliar.</p> <p>b. PT Malamoi Olom Wobok saat ini sedang membangun SPBE dan dalam proses penyusunan RKL-RPL.</p> <p>c. PT Perahu Camaran dengan komitmen investasi sebesar Rp 22 Miliar telah mendapatkan fasilitas impor barang modal dan siap beroperasi.</p> <p>d. PT Sorong Ignite Ecopark dengan komitmen investasi sebesar Rp 20,5 triliun, hingga saat ini belum ada realisasi investasi karena masih menunggu hasil eksplorasi gas.</p> <p>e. BUPP KEK Sorong telah melakukan koordinasi dengan Petrogas dan sikap dari Petrogas adalah meminta kejelasan dan kepastian terkait permintaan gas dari potensi investasi yang ada di KEK Sorong</p> <p>f. Kementerian Investasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Sorong sedang melakukan review masterplan untuk menyesuaikan kondisi saat ini dan ditargetkan dapat dilakukan perubahan masterplan pada tahun 2024.</p>
9.	KEK Morotai	<p>a. Akumulasi capaian di KEK Morotai hingga tahun 2023 telah mencapai realisasi investasi sebanyak Rp 250,3 Miliar dari 7 Pelaku Usaha yang sudah berinvestasi di KEK Morotai.</p> <p>b. Realisasi penyerapan tenaga kerja kumulatif hingga 2023 sebanyak 293 tenaga kerja dengan capaian di tahun 2023 sebanyak 153 tenaga kerja (sebesar 25,5% dari jumlah</p>

		<p>penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan sebesar 600 orang).</p> <p>c. Rencana bisnis tahun 2024 ditargetkan untuk mencapai peningkatan investasi sebesar Rp 155 Miliar dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 400 orang.</p> <p>d. BUPP KEK Morotai meminta dukungan berupa percepatan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) perubahan wilayah KEK Morotai, konektivitas dan insentif pendukung, penetapan KEK Morotai sebagai pusat pengembangan Penangkapan Ikan Terukur khusus Zona 2, fasilitas regular untuk event di KEK Morotai, peningkatan kualitas tol laut, ketersediaan BBM, pemerataan jaringan telekomunikasi, percepatan sertifikasi lahan, dukungan keimigrasian, dan permohonan insentif daerah.</p> <p>e. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas perubahan PP KEK Morotai dan ditemukan bahwa investor yang akan masuk lebih banyak di industri perikanan, sedikit berbanding terbalik dengan tujuan utama perubahan wilayah untuk <i>shifting</i> kegiatan menjadi pariwisata.</p> <p>f. Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan bahwa dari 18 Pelaku Usaha yang diclaim BUPP KEK Morotai, baiknya hanya dicatat Pelaku Usaha yang memang sudah berkomitmen untuk berinvestasi di KEK Morotai.</p> <p>g. Rencana tindak lanjut: KEK Morotai perlu menyampaikan proses bisnis perubahan lokasi dari Falila ke Tanjung Dehegila lalu mengirim daftar investor yang</p>
--	--	---

		akan berinvestasi di KEK Morotai, setelah itu Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK akan melakukan pembahasan lanjutan dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait perubahan PP KEK Morotai.
10.	KEK Likupang	<p>a. Capaian investasi KEK Likupang hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp 509 Miliar yang terdiri dari investasi Badan Usaha sebesar Rp 341 Miliar dan Pelaku usaha sebesar Rp 167,5 Miliar.</p> <p>b. Realisasi tenaga kerja sebanyak 819 orang dengan 10 Pelaku Usaha.</p> <p>c. Dengan terbentuknya KEK Likupang diharapkan memiliki <i>multiplier effect</i> berupa pertumbuhan ekonomi wilayah sebesar 8% per tahun dan peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 15.139 orang.</p> <p>d. BUPP KEK Likupang telah melakukan rehabilitasi sosial budaya penanaman dan pemeliharaan bibit-bibit untuk rehabilitasi yang melibatkan warga sekitar. Selain itu, dari sisi lingkungan BUPP melakukan rehabilitasi hutan lindung, pembibitan dan studi tanaman endemik, program <i>wallace conservation</i>.</p> <p>e. BUPP KEK Likupang sedang menyiapkan <i>prelinery design</i> untuk <i>waterfront city</i> pembangunan wilayah untuk mendukung KEK Likupang.</p> <p>f. Terkait perizinan wilayah usaha kelistrikan, saat ini masih menunggu arahan untuk dilakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.</p> <p>g. Rencana tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengingat status KEK Likupang yang belum beroperasi, BUPP KEK Likupang diminta menyampaikan laporan

		<p>kesiapan beroperasi kepada Dewan Nasional KEK untuk dilakukan evaluasi terhadap kesiapan operasionalisasi KEK Likupang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUPP KEK Likupang akan mendaftarkan beberapa Pelaku Usaha ke dalam sistem aplikasi KEK untuk implementasi pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK.
11.	KEK Bitung	<ol style="list-style-type: none"> a. Akumulasi capaian di KEK Bitung hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi investasi sebanyak Rp 1,53 Triliun dari 9 Pelaku Usaha yang tercatat. b. Realisasi tenaga kerja sebanyak 819 orang dengan 10 Pelaku Usaha. c. Rencana bisnis tahun 2024, BUPP akan mendorong investasi dari PT Indojaya Fortuna, PT Indo Lautan Mas, dan PT Indo World dengan total rencana investasi sebesar Rp 150 Miliar. d. BUPP KEK Bitung meminta dukungan pemerintah untuk melakukan pematangan lahan, pembangunan jalan kawasan, pembebasan lahan, pembangunan drainase, pembuatan titik – titik koordinat dan blok kavling dengan total rencana investasi sebesar Rp 1,33 Triliun. e. BUPP KEK Bitung akan tetap berupaya untuk mempromosikan KEK ini, dimana fokusnya adalah menarik pelaku usaha yang berlokasi di lahan luar 92,7 Ha. f. Pemerintah Kota Bitung telah membentuk tim yang terdiri dari Administrator, BPN, dan Bea Cukai untuk mendorong investor eksisting masuk ke KEK. g. Terkait lahan 92,79 Ha, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan masuk kawasan sepanjang 1 km.

		<p>Rencana tersebut telah masuk dalam Inpres daerah yang dianggarkan pada Semester 1 tahun 2024.</p> <p>h. Gubernur Sulawesi Utara selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Sulawesi Utara, bertanggung jawab sebagai pengusul KEK untuk menyelesaikan isu di KEK Bitung (penyertaan modal ke BUPP dan pematangan lahan 92,7 Ha).</p> <p>i. Rencana tindak lanjut: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam waktu dekat akan menyampaikan surat permohonan dan dukungan terkait KEK di Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu lampirannya terkait permohonan untuk mempertahankan status KEK Bitung.</p>
12.	KEK Palu	<p>a. Capaian investasi kumulatif KEK Palu hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp 773,1 Miliar yang terdiri dari investasi Badan Usaha sebesar Rp 33 Miliar dan Pelaku Usaha sebesar Rp 740,1 Miliar.</p> <p>b. Capaian investasi di tahun 2023 meningkat sebanyak Rp 402,12 Miliar (sebesar 60,93% dari investasi yang ditargetkan di tahun 2023 sebesar Rp 660 Miliar).</p> <p>c. Realisasi penyerapan tenaga kerja kumulatif hingga 2023 sebanyak 354 orang dengan 10 Pelaku Usaha. Sementara capaian di tahun 2023 untuk realisasi penyerapan tenaga kerjanya adalah sebanyak 55 tenaga kerja (hanya sekitar 5,67% dari yang jumlah penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan sebesar 970 orang).</p> <p>d. Lahan yang dimiliki 1.500 Ha, saat ini telah dikuasai sebesar 756,89 Ha (sekitar 50,45%). Dimana seluas 73 Ha diantaranya merupakan penguasaan lahan oleh Pemerintah Kota Palu yang telah</p>

		<p>dilakukan penyertaan modal sebesar 30 Ha ke BUPP.</p> <p>e. Adanya komitmen investasi dari PT Dingli Steel Indonesia untuk investasi industri biji besi mencapai sebesar Rp 19 Triliun.</p> <p>f. Rencana kerja tahun 2024 ditargetkan untuk mencapai peningkatan investasi sebesar Rp 2,7 Triliun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.050 orang yang keseluruhannya berasal dari target investasi Pelaku Usaha, diantaranya yang paling besar adalah rencana investasi di PT Surya Energi Palu untuk investasi pembangkit Listrik EBT dan PT Dingli Steel Indonesia. Selain itu juga dari beberapa investasi lainnya seperti dari PT Wanhong yang sudah 95% selesai konstruksi, PT Asbuton, PT Hongthai, PT SCC, PS SGC, PT Sentosa Utama Lestari, PT Ganda Parade Artana, PT Sofi Agro, PT PBR, PT Cokobo Prima Waste, PT AKAS, PT Artakindo Multi Perkasa, dan PT Wijaya Prima Adiatama.</p> <p>g. Rencana tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya bukti dukung untuk perizinan berusaha, dokumen pembebasan lahan, dan bukti dukung lainnya terkait rencana investasi baru di KEK Palu. Jika sudah ada progres bisa digunakan sebagai laporan selanjutnya. • Hal-hal terkait administratif untuk pengajuan perizinan berusaha, dan pengajuan kawasan pabean perlu diperhatikan untuk realisasi investasinya.
13.	KEK Mandalika	<p>a. Capaian kumulatif investasi KEK Mandalika pada 2023 adalah sebesar Rp 4,921 Triliun dengan serapan tenaga kerja sejumlah 12.601 orang dari target 15.343 orang dengan jumlah Pelaku</p>

		<p>Usaha sebanyak 19 Pelaku Usaha.</p> <p>b. Dari keseluruhan lahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebesar 1.035,67 ha, saat ini pemanfaatannya telah mencapai 26%.</p> <p>c. KEK Mandalika belum berhasil mencapai realisasi investasi sesuai target tahun 2023 meskipun investasi di luar kawasan sudah lebih jauh berkembang</p> <p>d. Capaian penyerapan tenaga kerja di KEK Mandalika cukup tinggi (capaian 82,12%) karena memasukan jumlah tenaga kerja musiman pada event WSBK dan MotoGP 2023</p>
14.	KEK Tanjung Lesung	<p>a. Capaian investasi KEK Tanjung Lesung hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp 2,48 Triliun yang terdiri dari investasi Badan Usaha sebesar Rp 528 Miliar dan Pelaku Usaha sebesar Rp 1,9 Triliun.</p> <p>b. Realisasi penyerapan tenaga kerja kumulatif hingga 2023 sebanyak 3.700 orang dengan capaian di tahun 2023 sebanyak 770 orang dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan sebesar 9.296 orang.</p> <p>c. Capaian investasi dan tenaga kerja di KEK Tanjung Lesung saat ini belum optimal, sehingga BUPP perlu melakukan akselerasi perkembangan di KEK Tanjung Lesung.</p> <p>d. Rencana tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none">• BUPP akan mengkaji kembali masterplan dengan menyesuaikan pasar investasi yang signifikan di KEK Tanjung Lesung.• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang akan berencana membuat peraturan daerah terkait

		<p>insentif termasuk untuk Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung.</p> <p>e. Rencana bisnis tahun 2024 ditargetkan untuk mencapai peningkatan investasi sebesar Rp 682 Miliar.</p>
15.	KEK Singhasari	<p>a. Secara kumulatif capaian investasi KEK Singhasari pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.146,70 Miliar.</p> <p>b. Realisasi investasi dan tenaga kerja KEK Singhasari saat ini masih jauh dari target yang ditentukan.</p> <p>c. Penambahan tenaga kerja tidak sebanding dengan kenaikan investasi.</p> <p>d. Capaian penyerapan tenaga kerja pada 2023 belum berjalan dengan optimal karena adanya kemunduran pelaksanaan <i>project</i> konstruksi yang pada mulanya akan terlaksana pada 2023, menjadi tahun 2024, antara lain pembangunan Kampus KCL dan Center for Future Works.</p>
16.	KEK Lido	<p>a. Capaian investasi KEK Lido secara akumulatif adalah sebesar Rp 4,18 Triliun dan berhasil menyerap total sebanyak 3.847 tenaga kerja.</p> <p>b. Realisasi investasi di tahun 2023 sudah mencapai target Rp 1,27 Triliun dari target awal Rp 694 Miliar, dengan serapan tenaga kerja juga berhasil mencapai sebanyak 2.398 orang dari target 877 orang.</p> <p>c. Terdapat penambahan 2 Pelaku Usaha sehingga total menjadi 6 Pelaku Usaha, tetapi yang sudah mencatatkan realisasi investasinya baru 4 Pelaku Usaha.</p> <p>d. Saat ini BUPP KEK Lido masih dalam tahap penyelesaian konstruksi. Selain kegiatan pariwisata, KEK Lido juga mengembangkan bidang perfilman melalui PT MNC Movieland</p>

		<p>saat ini pembangunannya sudah tahap 2.</p> <p>e. Rencana bisnis BUPP KEK Lido di tahun 2024 akan mengembangkan <i>macro infrastructure</i> dan Lido Music Art Center (konser musik) sebanyak Rp 41,19 miliar total target investasi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yaitu Rp 880 miliar.</p> <p>f. Rencana tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUPP akan mengembangkan proyek baru dalam rencana bisnis 2024 yaitu Lido Theme Park dan Lido World Garden. • Belum terbitnya Peraturan Bupati Bogor dan terdapat tambahan persyaratan yang kontra produktif, belum terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat. • Terkait sumber air bersih, perlu diskusi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan poin pelayanan perizinan dan non perizinan, belum sepenuhnya di Administrator KEK, karena adanya perubahan izin prakarsa. • Isu tol Cigombong perlu didiskusikan kembali beserta akses jalan dan revitalisasi situ Lido yang perlu didiskusikan dan menyelesaikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemangku kepentingan (pemilik aset). • Terkait promosi KEK Pariwisata, Dewan Nasional akan menyelenggarakan forum yang lebih masif untuk sektor pariwisata, sekaligus <i>benchmark</i> dengan SEZ diluar negeri.
17.	KEK Kendal	a. Capaian Realisasi investasi KEK Kendal di tahun 2023 telah

		<p>berhasil melebihi targetnya yaitu sebesar Rp 20,9 Triliun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 18.095 orang.</p> <p>b. Total capaian kumulatif KEK Kendal dari sejak ditetapkan hingga 2023 sebesar Rp 41,8 Triliun dan berhasil menyerap sebanyak 40.891 orang, dengan total Pelaku Usaha 96 tenant.</p> <p>c. KEK Kendal pada rencana bisnis di tahun 2024, akan menaikkan target nilai investasi KEK Kendal sebesar Rp 17,7 Triliun dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 15.100 orang. Target FDI KEK Kendal dalam 5 tahun USD 500 Miliar atau sebesar Rp 72 Triliun</p> <p>d. Rencana tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah.• Perlu perbaikan kelembagaan Dewan Kawasan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022, sehingga Sekretaris Dewan Kawasan dijabat oleh Sekretaris Daerah bukan DPMPSTP.• PP II DJP akan segera memproses SKB milik PT Kawasan Industri Kendal selaku BUPP KEK Kendal setelah proses sistem aplikasi <i>real time</i> selesai.• Persetujuan Impor untuk Barang Modal Tidak Baru (BMTB) dalam rangka Relokasi Industri yang diajukan oleh PT Polygroup akan segera diproses oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK.
--	--	--

18.	KEK Gresik	<p>a. Capaian realisasi investasi KEK Gresik di tahun 2023 sebesar Rp 32,1 Triliun dan telah berhasil meningkat 8 kali lipat dari target tahun 2023 sebesar Rp 3,67 Triliun.</p> <p>b. Capaian penyerapan tenaga kerja KEK Gresik tahun 2023 adalah sebanyak 19.000 tenaga kerja dan telah melebihi target. Namun demikian, target KEK Gresik perlu untuk ditingkatkan kembali karena pelaku usaha di KEK Gresik merupakan industri skala besar dan padat modal yang nilai investasinya memang relatif besar.</p> <p>c. Total capaian kumulatif KEK Gresik hingga tahun 2023 sebesar Rp 65,3 Triliun dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 32.000 orang dengan total 23 Pelaku Usaha.</p> <p>d. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi target tahun 2024 KEK Gresik sebesar Rp 28,9 Triliun dan penyerapan tenaga kerja 1.258 orang. • Sehubungan dengan rencana operasionalisasi beberapa investor di KEK Gresik perlu dilakukan percepatan penyelesaian pelebaran jalan nasional daendels tahap 2 sepanjang 2,2 km dan kelanjutan jalan tol seksi Bunder-Manyar. • Terkait ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di KEK, mekanisme PBG di KEK tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, bahwa Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha tidak memerlukan PBG sepanjang Badan Usaha telah menetapkan pedoman
-----	------------	--

		<p>bangunan atau <i>Estate Regulation</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di KEK akan diterbitkan oleh Administrator KEK Gresik yang kemudian didaftarkan dalam sistem SIMBG. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK saat ini sedang menunggu konfirmasi dari Kementerian PUPR untuk hal teknis terkait. Secara paralel, Administrator KEK Gresik dapat mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan SLF dari Badan Usaha/Pelaku Usaha yang melakukan Pembangunan di KEK sebagai dasar penerbitan SLF oleh Administrator KEK.
19.	KEK Sanur	<p>a. Capaian kinerja kumulatif KEK Sanur pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,06 Triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 2.105 orang.</p> <p>b. Capaian kinerja untuk realisasi investasi KEK Sanur selama tahun 2023 adalah sebesar Rp 980,6 Miliar dari target investasi tahun 2023 yaitu Rp 5,5 Triliun, sedangkan untuk realisasi tenaga kerja selama tahun 2023 adalah sebanyak 2.105 dari total target tenaga kerja yaitu 4.250 orang.</p> <p>c. PT Hotel Indonesia Natour (HIN) selaku BUPP KEK Sanur menyampaikan beberapa isu strategis sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Service Level Agreement (SLA)</i> Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Asing dan Diaspora • SLA Pemasukan dan Pengawasan Obat dan Alat Kesehatan Impor • Pembentukan <i>Medical Facility Committee</i>

		<ul style="list-style-type: none">• Nilai sewa jangka panjang agar dapat diperhitungkan sebagai nilai investasi <p>d. Rencana bisnis KEK Sanur tahun 2024 ditargetkan untuk mencapai peningkatan investasi sebesar Rp 1.380 Miliar dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.600 orang.</p> <p>e. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK sedang berupaya untuk mempercepat penunjukan dan penetapan Administrator KEK Sanur yang baru.</p>
--	--	---

Terkait dengan dukungan pada pemberian fasilitas dan kemudahan pada Kawasan Ekonomi Khusus, telah dilakukan berbagai kegiatan penyusunan dan penyempurnaan NSPK pengembangan iklim investasi. Beberapa jenis dokumen NSPK yang digunakan untuk meningkatkan investasi di KEK diantaranya adalah:

1. Evaluasi kesiapan beroperasi
2. Evaluasi pengelolaan KEK
3. Penerbitan Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan Pelaku Usaha
4. Pemasukan barang dari LDP dan/atau TLDDP ke KEK dan pengeluaran barang ke TLDDP dan atau LDP
5. Pedoman persetujuan impor
6. Guideline penyusunan pedoman
7. Pedoman penyusunan *estate regulation*
8. Pedoman masterplan KEK

Selain pemberian layanan fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK juga memberikan fasilitas pada pembebasan Bea Masuk dan PDRI di Kawasan Ekonomi Khusus. Pelaksanaan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PDRI tersebut diberikan pada Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan impor barang.

Seiring dengan perkembangan dan pembangunan KEK di Indonesia, terdapat berbagai isu strategis yang perlu diselesaikan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, antara lain:

1. Koordinasi antara K/L dalam memberikan dukungan infrastruktur terhadap KEK.
2. Koordinasi antara K/L dalam penyelesaian/penyempurnaan peraturan pelaksana terkait KEK.
3. Penyempurnaan peraturan dan NSPK dalam rangka meningkatkan daya saing KEK.
4. Peningkatan kelembagaan KEK, Administrator KEK dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas.
5. Peningkatan jaringan investor dan promosi investasi baik dalam dan luar negeri.

Maka dalam rangka menyelesaikan berbagai isu-isu strategis tersebut, pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah mencoba melaksanakan kegiatan koordinasi *debottlenecking* dan penyelesaian isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dan Badan Usaha. Pelaksanaan kegiatan isu *debottlenecking* dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi kegiatan dengan melaksanakan perjalanan dinas dan rapat koordinasi di masing-masing KEK.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan masing-masing KEK.
3. Pelaksanaan rapat kerja dan rapat koordinasi tiap semester mengundang BUPP KEK, Pelaku Usaha, Administrator KEK, dan Sekretariat Dewan Kawasan.



Gambar 3. Berbagai Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Debottlenecking dan Penyelesaian Isu dan Permasalahan di KEK

Kegiatan identifikasi *debottlenecking issue* juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja masing-masing KEK. Perkembangan dan pengelolaan KEK ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan, mulai dari masalah infrastruktur ataupun masalah implementasi fasilitas dan kemudahan. Oleh karena itu dibutuhkan audiensi dengan pihak BUPP KEK maupun pihak Pelaku Usaha dan instansi K/L.

Pencapaian target program ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melakukan monitoring perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang berkontribusi dalam perekonomian nasional dan wilayah. Maka untuk terus berusaha meningkatkan realisasi investasi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus, dilakukan pula upaya-upaya dalam rangka memberikan pelayanan dalam kemudahan berinvestasi di KEK.

Terkait dengan pengembangan iklim investasi dalam KEK, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK mempunyai tugas dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dalam penyiapan pelayanan perizinan, serta fasilitas dan kemudahan kerja sama. Secara fungsinya, dilakukan pula kegiatan penyiapan standar pelayanan perizinan berusaha, perizinan lainnya dan non perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus, pengkajian daya saing pelayanan perizinan, penyiapan penyelesaian

hambatan pemberian insentif dan kemudahan, serta pengembangan kerja sama.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Berbagai hambatan ditemukan dalam pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi KEK, diantaranya yaitu berkaitan dengan kapasitas BUPP, fasilitas dan kemudahan, isu Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), serta perda insentif daerah. Setiap KEK secara lebih lanjut memiliki berbagai permasalahan dan kendala yang berbeda-beda, mulai dari permasalahan kapasitas BUPP diantaranya, BUPP yang tidak memiliki dan tidak dapat mengelola aset lahan KEK (dikarenakan aset tersebut dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota). Selain itu, masalah seperti BUPP yang tidak memiliki kemampuan pendanaan dan tidak memiliki manajemen yang profesional, BUPP tidak memiliki rencana bisnis yang menarik investasi, dukungan pemerintah daerah selaku pemegang saham BUMD yang sangat minim, perubahan fokus bisnis dari rencana awal, dan lain sebagainya. Belum lagi permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas dan kemudahan, seperti fasilitas *tax holiday*, keimigrasian/ketenagakerjaan, hingga masalah pertanahan, dan masih banyak kendala lain yang ditemui.

Meskipun telah menemui berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi KEK, tetapi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK terus berupaya untuk bekerja sama dengan Administrator KEK dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kepada Pelaku Usaha untuk mempermudah dan mempercepat realisasi investasi di KEK yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2023, disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya, diantaranya perlu melakukan *follow-up* dengan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah terkait dengan pemberian pelayanan dan fasilitas kepada Pelaku Usaha untuk dapat mempermudah dan mempercepat realisasi investasi di KEK eksisting.

1.2. Jumlah Kawasan
Ekonomi Khusus
yang Difasilitasi
dan
Dikembangkan

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus perlu didukung oleh infrastruktur baik dalam maupun luar kawasan dan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru diharapkan dapat tercapai secara optimal dengan adanya penyelenggaraan KEK. Salah satu faktor yang menentukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yaitu adanya investasi atau penanaman modal yang dapat mendorong bergeraknya roda perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Maka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang berada di KEK secara langsung, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK berkoordinasi dengan Administrator KEK yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang difasilitasi dan dikembangkan	Jumlah KEK	19 KEK	20 KEK	100%

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas dalam memberikan pelayanan berusaha, pelayanan perizinan, dan pemberian fasilitas kemudahan bagi badan usaha dan pelaku usaha yang beroperasi di KEK. Dalam pemberian pelayanan, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memastikan seluruh isu strategis, baik dari penyelesaian infrastruktur maupun regulasi peraturan diselesaikan. Maka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang berada di KEK secara langsung, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK berkoordinasi dengan Administrator KEK yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

Administrator KEK memiliki tugas dan fungsi utama dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha, pelayanan perizinan non-perizinan yang diperlukan Badan Usaha dan Pelaku Usaha, serta melakukan pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Administrator KEK melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam debottlenecking permasalahan perizinan dan perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja KEK. Fasilitasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus secara lebih lanjut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh Kawasan Ekonomi Khusus yang ada, yang dihitung dalam sebuah formula berikut,

Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang difasilitasi dan dikembangkan = Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan melalui PP

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja merupakan jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang difasilitasi dan dikembangkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh Kawasan Ekonomi Khusus yang ada. Jumlah layanan yang diberikan dapat berbentuk *coaching clinic*, penyelesaian isu strategis, dan juga fasilitas kemudahan yang didapatkan oleh stakeholder.

Berdasarkan hasil kajian dampak yang bekerja sama dengan LPEM-UI, didapatkan hasil bahwa sebagian besar Kawasan Ekonomi Khusus telah berkembang dan berkinerja sangat baik. Meskipun memang masih terdapat sejumlah KEK lainnya yang berkembang dengan kecepatan yang lebih lambat. Hal tersebut telah diketahui dari perhitungan rasio pertumbuhan investasi terhadap pembangunan wilayah. Di lain sisi, berdasarkan indikator investasi dan produksi, beberapa KEK dengan sektor manufaktur menunjukkan tingkat perkembangan yang lebih cepat, khususnya pada 3-4 tahun terakhir; yang didorong oleh investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN), industri berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam (komoditas perkebunan dan mineral logam) yang berorientasi ekspor, serta substitusi impor yang berteknologi tinggi.

Pada KEK bertema pariwisata yang memiliki event nasional/internasional atau memiliki tingkat *attractiveness* yang tinggi dan bervariasi, dan berlokasi di dekat daerah kantong penduduk (calon wisatawan), seperti KEK Lido, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Mandalika memang berkembang lebih cepat. Sementara pada KEK Pariwisata yang kurang memiliki *attractiveness destination* atau berlokasi jauh dari kantong-kantong penduduk dan susah diakses oleh semua kalangan, cenderung berkembang lebih lambat, seperti KEK Tanjung Kelayang, KEK Likupang, dan KEK Morotai.

Pada KEK bertema digital, seperti KEK Nongsa dan KEK Singhasari, secara umum telah berkembang dengan baik, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti permasalahan lahan, listrik yang kurang stabil, keterbatasan ketersediaan air bersih untuk pendingin, kesulitan pinjaman (*collateral* tidak ada), dan ketersediaan digital talent.

Hingga Triwulan IV, telah dilakukan serangkaian kegiatan guna menyusun Rekomendasi NSPK terkait Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus berupa Rapat Kerja Triwulan IV TA 2023. Penyusunan Rekomendasi NSPK terkait Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus juga dilakukan dalam kegiatan rapat terkait Kajian Evaluasi Penyelenggaraan KEK bersama LPEM UI serta melakukan kunjungan lapangan yang diselenggarakan di beberapa KEK yang termasuk KEK Industri dan KEK Pariwisata. Selain itu, pada akhir Triwulan IV, dilakukan dilaksanakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan KEK dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun dengan Tim LPEM UI, BRIN, dan PT Layar Terkembang Membentang di Surabaya.

Sebagai awal kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus, diadakan rapat kerja KEK bersama dengan BUPP dan Administrator untuk mendapatkan informasi keseluruhan mengenai rencana kerja tahunan, target, isu, dan isu strategis pada masing-masing KEK. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan KEK, harus dilakukan observasi secara langsung dan dokumentasi berdasarkan pertumbuhan dan pengembangan KEK.

Selain berbagai kegiatan di atas, terdapat pula beberapa urusan yang diselesaikan oleh Administrator KEK, diantaranya adalah seperti Surat Keterangan Nilai Kandungan Lokal (NKL), Surat pemberitahuan tentang adanya penetapan peraturan di KEK, surat dari Pelaku Usaha terkait beberapa permohonan dan pemberitahuan, surat permohonan untuk studi banding, hingga surat pengajuan NPU. Beberapa kegiatan kunjungan dan monitoring juga dilakukan oleh Administrator KEK sebagai bentuk kegiatan pengawasan kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha.

Sesuai rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/ pengembangan KEK	Terlaksana	Pada Triwulan IV Tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan Penyiapan Evaluasi Kinerja terkait Rapat Kerja Nasional di KEK Tanjung Kelayang. Dimana dalam kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan kerjasama dan promosi KEK berupa <i>Business Forum</i> . Selain itu, telah dilaksanakan pula kunjungan lapangan serta rapat koordinasi dengan K/L terkait, untuk membahas dan menyusun Rekomendasi Pengendalian Pembangunan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus.
2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan KEK	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi kegiatan dengan melaksanakan perjalanan dinas dan rapat koordinasi di masing-masing KEK

Kegiatan fasilitasi dan pengembangan pada Kawasan Ekonomi Khusus juga berkaitan dengan pengembangan kebijakan strategis pengembangan KEK yang dilakukan melalui kegiatan penyusunan kebijakan dan strategis pengembangan wilayah KEK. Dimana turunan kegiatan tersebut adalah berkaitan dengan dokumen masterplan KEK. Sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021, bahwa Perencanaan kawasan di dalam KEK ditetapkan dalam masterplan KEK oleh Badan Usaha.

Sejalan dengan hal tersebut disusunlah dokumen Pedoman Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dimana dokumen masterplan tersebut harus melalui tahap review dan endorsement oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Nantinya endorsement inilah yang digunakan sebagai dasar oleh Badan Usaha untuk menetapkan dokumen masterplan KEK. Beberapa dokumen masterplan yang saat ini masih berada dalam tahap review, diantaranya yaitu dokumen Masterplan KEK Kendal, dokumen Masterplan KEK Nongsa, dokumen Masterplan KEK Singhasari, dokumen Masterplan KEK Mandalika, dokumen Masterplan KEK Tanjung Lesung, serta dokumen Masterplan KEK Sei Mangkei. Monitoring dan evaluasi terkait review penyusunan dokumen masterplan tersebut akan terus dipercepat hingga mendapatkan endorsement dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, agar kedepannya semakin menambah jumlah dokumen masterplan yang ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pengembangan KEK menemui berbagai hambatan, khususnya mengenai fasilitas dan kemudahan dalam KEK. Pada pemberian fasilitas *tax holiday*, verifikasi permohonan pengajuan masih memakan waktu lebih dari 5 hari, bahkan memerlukan waktu lebih dari sebulan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan SLA. Kemudian jangka waktu pemberian *tax holiday* yang tidak sesuai dengan PMK 237 Tahun 2021, meskipun nilai investasi sudah lebih dari *threshold* 100 miliar. Selain itu, adapun persyaratan tambahan yang diberikan dalam memberikan fasilitas *tax holiday*, dimana adanya ketentuan kemitraan UMKM dengan nilai minimal 500 juta atau 1-2% dari nilai investasi dan adanya evaluasi terkait *Internal Rate of Return* (IRR) dan *Payback Period* (PP) tanpa diberikan standar yang harus dipenuhi.

Pada fasilitas keimigrasian/ketenagakerjaan juga ditemui beberapa hambatan, yaitu belum adanya pelayanan jalur khusus untuk Badan Usaha/Pelaku Usaha di KEK, serta perlu disusunnya SOP untuk tenaga kerja yang juga harus dikontrol oleh administrator. Sedangkan pada isu pertanahan masih belum adanya peraturan terkait implementasi fasilitas perpanjangan dan pembaruan sekaligus untuk Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di KEK. Dari berbagai kendala tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan bekerja sama dengan Administrator KEK serta Badan Usaha Pembangun dan Pengelola akan terus berupaya untuk memberikan fasilitas kepada Pelaku Usaha untuk mempermudah dan mempercepat realisasi investasi di KEK yang telah ditetapkan.

Selain itu, sepanjang penyelesaian fasilitasi dan pengembangan pada Kawasan Ekonomi Khusus yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan strategis pengembangan KEK juga sedikit mengalami sedikit kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan untuk saat ini organisasi memprioritaskan pengembangan KEK yang sudah ditetapkan. Meskipun begitu, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK tetap berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan penyusunan dan pengembangan kebijakan, koordinasi penyusunan standar dan prosedur sektor industri KEK yang berdaya saing, serta koordinasi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah KEK.

2

Sasaran Program 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2 yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang berkualitas, yang diselesaikan dengan indikator berupa indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, Kawasan Ekonomi Khusus perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK perlu didukung oleh infrastruktur baik dalam maupun luar kawasan dan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK.

Dalam membangun dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, terdapat tiga hal utama yang perlu ditingkatkan, yaitu regulasi dan peraturan yang mendukung terwujudnya iklim investasi di KEK, infrastruktur baik di dalam KEK maupun integrasi infrastuktur di wilayah sekitar KEK dalam mendukung operasional dan kegiatan di KEK, serta sumber daya manusia yang berkapasitas dan berkompeten dalam pelayanan investasi dan pembangunan KEK yang berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2023, indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang telah terealisasi adalah dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Nilai	3 (skala 4)	3,58	$\frac{\text{Index Realisasi}}{\text{Target Capaian}} \times 100\% = 119,33\%$

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru diharapkan dapat tercapai secara optimal dengan adanya penyelenggaraan KEK. Salah satu faktor yang menentukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yaitu adanya investasi atau penanaman modal yang dapat mendorong bergeraknya roda perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Dimana presentase penyelesaian ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh Kawasan Ekonomi Khusus yang ada, yang dihitung dalam sebuah formula berikut,

$$\text{Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian} = \frac{\text{rata rata capaian kinerja indikator yang mempengaruhi IKU pada perspektif stakeholder}}{\Sigma \text{indikator yang dihitung}}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh Kawasan Ekonomi Khusus yang ada. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut.

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan KEK	Terlaksana	<p>Pada Triwulan IV TA 2023, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden Nomor KEK-340/M.EKON/12/2023 tanggal 8 Desember 2023, telah ditetapkan 3 (tiga) KEK baru di Indonesia berdasarkan Sidang Dewan Nasional KEK pada 30 November 2023 oleh Dewan Nasional, diantaranya yaitu KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, dan KEK Nipa. Fasilitasi penyiapan usulan pembentukan KEK akan terus dilakukan dengan pengembangan kegiatan usaha berupa pengembangan Kesehatan Internasional, Pendidikan Tinggi Luar Negeri, Industri Halal, serta Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam, baik pertambangan, pertanian, perkebunan.</p>
2	Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan	Terlaksana	<p>Dalam mendukung percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan, telah dilakukan koordinasi internal serta perjalanan dinas guna menyusun acuan untuk membahas penyusunan NSPK standar pembangunan dan pengelolaan KEK, telah disusun pula rekomendasi pengembangan investasi dan iklim</p>

		<p>investasi di KEK untuk meningkatkan daya saing investasi KEK, telah mengikuti kegiatan terkait Rekomendasi NPSK terkait Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus, serta telah dilakukan kegiatan yang mendukung Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah 1 dan 2. Selain itu, telah dilaksanakan pula kegiatan yang mendukung Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu berupa kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap KEK.</p>
--	--	--

Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan berbagai kegiatan untuk mendukung penyelesaian evaluasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, diantaranya yaitu evaluasi usulan pembentukan KEK, fasilitasi penyiapan usulan pembentukan KEK, serta audiensi usulan KEK baru. Evaluasi usulan pembentukan KEK secara lebih lanjut dilakukan dalam Sidang Dewan Nasional KEK pada 30 November 2023 oleh Dewan Nasional. Melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden Nomor KEK-340/M.EKON/12/2023 tanggal 8 Desember 2023, hal Rekomendasi Pembentukan dan Penetapan 3 (tiga) KEK Baru dan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KEK Setangga, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang KEK Tanjung Sauh, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KEK Nipa, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK. Berdasarkan hal tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) KEK baru di Indonesia, diantaranya yaitu KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, dan KEK Nipa. Dewan Nasional mengajukan rekomendasi kepada Presiden yang disertai dengan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan suatu wilayah sebagai KEK, dimana penyusunan rancangan peraturan pemerintah tersebut mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain evaluasi usulan, dilakukan pula kegiatan fasilitasi penyiapan usulan pembentukan KEK. Fasilitasi ini dilakukan pada rencana usulan pembentukan KEK, yang akan mengembangkan kegiatan usaha berupa pengembangan Kesehatan Internasional, Pendidikan Tinggi Luar Negeri, Industri Halal, serta Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam, baik pertanian, perkebunan, maupun pertambangan.

Penyelesaian evaluasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus tidak hanya terbatas pada usulan KEK baru saja, tetapi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK juga memberikan fasilitasi perubahan Kawasan Ekonomi Khusus yang telah ditetapkan. Perubahan Kawasan Ekonomi Khusus yang terjadi pada tahun 2023 diantaranya adalah perluasan KEK Galang Batang, penambahan kegiatan usaha pada KEK Singhasari, serta perubahan kegiatan usaha pada KEK Morotai.

Pada proses pengendalian di bidang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat kebijakan yang dibuat sebagai hasil proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, dan penyelesaian permasalahan antar kementerian, pelaksanaan pengendalian kebijakan, pengawalan program prioritas, dan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L terkait kebijakan tersebut. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam rangka implementasi peraturan tersebut dapat terlaksana, maka Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK bertugas dalam menyusun dan mengimplementasikan peraturan tersebut melalui peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dst. Dalam penyelesaian indikator kinerja, terdapat peraturan pelaksana yang menjadi delegasi langsung kepada Dewan Nasional KEK, tetapi juga terdapat peraturan yang harus dikoordinasikan lintas sektor antar K/L dan juga Pemerintah Daerah. Selain itu, pengembangan iklim investasi di Kawasan Ekonomi Khusus juga memerlukan penyelesaian peraturan dan regulasi yang mempermudah penyelenggaraan KEK dan juga memberikan fasilitas kemudahan yang menjadi dasar pertumbuhan KEK yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas dalam memberikan pelayanan berusaha, pelayanan perizinan, dan pemberian fasilitas kemudahan bagi badan usaha dan pelaku usaha yang beroperasi di KEK. Dalam pemberian pelayanan, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memastikan seluruh isu strategis, baik dari penyelesaian infrastruktur maupun regulasi peraturan diselesaikan, utamanya pada pemberian pelayanan berupa fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Pada pemberian pelayanan ini, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melalui Administrator KEK, juga melakukan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS berdasarkan pengajuan dari Pelaku Usaha dan Badan Usaha, Penerbitan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) pada sistem OSS

berdasarkan pengajuan dari Pelaku Usaha dan Badan Usaha, serta Penerbitan Surat Keterangan Nilai Kandungan Lokal (NKL).

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melalui Administrator KEK, juga memastikan bahwa jumlah dokumen masterlist yang diselesaikan sudah sesuai dengan jumlah masterlist yang diajukan. Hal tersebut dapat dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif bagi Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam hal ini, Masterlist yang diterima dan dikeluarkan SKEP tersebut sudah melalui proses verifikasi dari Staf Administrator dan Kepala Administrator KEK, serta untuk perizinan berusaha dan PBUMKU dalam penerbitannya juga sudah melalui tahap verifikasi oleh Staf Administrator dan Kepala Administrator KEK. Kemudian untuk penerbitan surat keterangan NKL juga sudah dilakukan proses verifikasi dan perhitungan Kembali oleh Staf Kepala Administrator KEK.

Seluruh Pelaku Usaha yang ingin menanamkan modalnya di dalam Kawasan Ekonomi Khusus haruslah yang bersifat eligible, dimana di dalamnya terdapat peran Administrator KEK untuk mengawal dan memonitoring hal tersebut. Kegiatan pelayanan non-perizinan yang dimaksud disini adalah banyaknya kegiatan koordinasi/sosialisasi /asistensi yang telah berhasil dilaksanakan oleh Administrator KEK. Pelayanan non-perizinan yang dilakukan oleh Administrator KEK meliputi koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga melakukan sosialisasi dengan Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang ada di dalam KEK.

Rencana aksi yang sudah tercapai oleh Administrator KEK adalah menyetujui pengajuan masterlist untuk barang modal. Dalam hal ini, barang modal yang diberikan masterlist adalah barang-barang yang digunakan Pelaku Usaha dalam tahap pembangunan dan konstruksi. Selain itu, adapun dokumen masterlist yang digunakan untuk Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor, Perizinan Berusaha dalam bentuk IZIN, kemudian PB-UMKU dalam bentuk SKPL A, SKPL B dan SKPL C.

Pada penyelesaian urusan di Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, selain kebijakan dan kemudahan yang ditetapkan, dilakukan pula upaya untuk meningkatkan penanaman modal. Maka dalam rangka meningkatkan penanaman modal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melakukan penyelesaian rekomendasi kegiatan peningkatan iklim investasi KEK, promosi dan kerja sama, serta komunikasi dan sistem informasi. Beberapa kegiatan kerja sama yang telah dilakukan selama Triwulan IV diantaranya adalah

1. Kerja sama BRIN dalam menyusun *policy brief* mengenai Optimalisasi Manfaat Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Wilayah Sekitar, yang difokuskan pada KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Mandalika
2. Kerja sama LPEM UI dalam menyusun kajian Analisis Dampak Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus dan Indikator KEK Tematik, yaitu KEK Manufaktur, KEK Pariwisata, dan KEK Digital
3. Kerja sama PROSPERA dalam menyusun Kajian Dampak KEK

4. Kerja sama MoTIE dalam penyusunan kerja sama Kawasan Ekonomi Khusus dengan Korea Free Economic Zone

Selain itu, terdapat kegiatan yang secara khusus dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dalam melakukan monitor kebijakan, diantaranya seperti IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area), serta kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI dalam pelaksanaan promosi investasi. Kemudian dalam rangka melaksanakan promosi investasi, dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya

1. Hannover Messe
2. Rapat Kerja dan Business Forum perkembangan KEK Industri Manufaktur dan Pariwisata di KEK Tanjung Kelayang
3. Special Economic Zone Business Forum di Singapura: Investment Opportunity in Manufacturing and Digital Industry in Indonesia Special Economic Zone
4. Promosi Investasi dengan tema Akses OECD Indonesia dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Berlin, Jerman; Paris, Perancis, dan Jeddah, Arab Saudi
5. Diseminasi Outlook Perekonomian Indonesia 2024, Potensi Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Belanda dan Belgia
6. Pelaksanaan promosi melalui media massa untuk meningkatkan hubungan dan awareness KEK di masyarakat
7. Proaktif menjadi narasumber dalam kegiatan seminar sebagai pembicara dan mempromosikan KEK pada calon investor (FEKDI)
8. Melayanai kedatangan delegasi negara lain untuk berkunjung ke KEK



Gambar 4. Kegiatan Kerja Sama dan Promosi KEK

Pelaksanaan kerja sama dan promosi secara lebih lanjut juga didukung dengan beberapa kegiatan penyebaran informasi mengenai perkembangan KEK, dimana pada Triwulan IV Tahun 2023, telah dilakukan di Universitas Mataram, Universitas Samratulangi, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Brawijaya. Penyebaran informasi tersebut juga sekaligus dilakukan pada pemberitaan KEK di

media sosial, dengan menyesuaikan trend dan isu yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan juga kegiatan pengembangan sistem dan data informasi pada website www.kek.go.id yang digunakan untuk meningkatkan jaringan hubungan dan kemudahan calon investor untuk mengakses data dan informasi mengenai KEK.

Berbagai kegiatan telah banyak dilakukan pada Triwulan IV yang dikerjakan untuk mendukung target kinerja penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus. Saat ini Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK tengah melakukan review terkait dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Penerapan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, adapun beberapa penyelesaian peraturan yang masih berada dalam tahap draft awal, diantaranya yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Skema Klasifikasi dan Kode Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya belum optimalnya koordinasi isu strategis dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2023, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, diantaranya diperlukan adanya mitigasi permasalahan yang berpotensi muncul dalam koordinasi lintas K/L, koordinasi yang lebih intens dan professional dalam pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait isu strategis yang diupayakan dapat diimplementasikan dengan optimal, melaksanakan proses persiapan dan pengumpulan data/informasi maupun hal lain yang dibutuhkan, serta memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melakukan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

Pada pelaksanaannya, Administrator KEK juga menemui beberapa kendala yang ditemui, diantaranya yaitu seperti kelengkapan dokumen pendukung masterlist yang kadang masih belum dilengkapi oleh Pelaku

Usaha dan ditemui adanya kesalahan penulisan di beberapa kata pada nama barang, nominal, atau satuan barang. Selain itu, masih terdapat banyak Pelaku Usaha yang belum mengajukan fasilitas-fasilitas yang diberikan karena kurangnya informasi terkait hal tersebut, serta perlu kesesuaian pada jenis barang yang diajukan dalam masterlist dengan dokumen-dokumen lampiran. Maka untuk dapat menuntaskan permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya yang dilakukan, seperti meminta pelaku usaha untuk membuat draft pengajuan dan berkonsultasi dengan Administrator KEK sebelum mengajukan masterlist, Pelaku Usaha diminta untuk melampirkan foto barang dan justifikasi penggunaan barang tersebut guna menunjukkan kesesuaian barang, serta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait pelayanan perizinan dan pelayanan fasilitas berusaha berbasis risiko melalui OSS, yang juga dapat mengundang narasumber dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik

Pencapaian Sasaran Program 3, yaitu terwujudnya tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang baik, yang ditunjukkan dengan indikator berupa indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Latar Belakang

Tata kelola Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program kegiatan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, program ini ditunjang dengan kegiatan administrasi program dan tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Maka untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2023, indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang telah terealisasi adalah dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Nilai	3 (skala 4)	3,11	$\frac{\text{Index Realisasi}}{\text{Target Capaian}} \times 100\% = 103,67\%$

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan kerjasama. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kelembagaan penyelenggaraan KEK untuk optimalisasi pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, khususnya dalam hal dukungan manajemen dan perkantoran serta efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional untuk mendukung penyelenggaraan KEK. Dimana presentase penyelesaian ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh Kawasan Ekonomi Khusus yang ada, yang dihitung dalam sebuah formula perhitungan berikut,

$$\text{peningkatan kapasitas} = \frac{\sum \text{indeks kualitas kegiatan peningkatan kapasitas}}{\sum \text{jumlah kegiatan peningkatan kapasitas}}$$

Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus merupakan turunan dari indikator tata kelola Kemenko Perekonomian, yang dikategorikan dalam 4 (empat) kategori:

1. Sangat baik, rentang nilai 85-100 (Indeks 4 dari 4)
2. Baik, rentang nilai 75-84 (Indeks 3 dari 4)
3. Buruk, rentang nilai 64-74 (Indeks 2 dari 4)
4. Sangat buruk, rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh Kawasan Ekonomi Khusus yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, yaitu melakukan serangkaian kegiatan peningkatan dan pengelolaan layanan umum Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut,

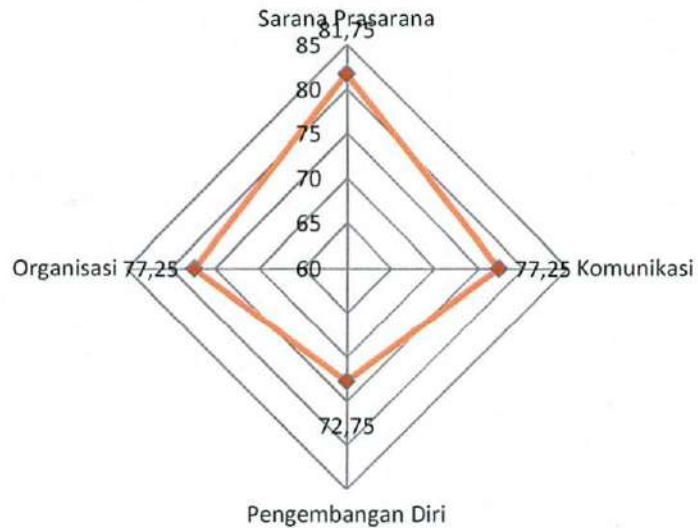
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan <i>Capacity Development dan Talent Center</i> di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan yang menunjang tercapainya <i>capacity development</i> dan <i>talent center</i> , diantaranya yaitu Pelatihan Dasar Dasar AMDAL dan ESIA pada tanggal 23-27 Oktober 2023, Bimbingan Teknis Aplikasi KEK pada KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali pada tanggal 3-4 November 2023, serta kegiatan Certified Procurement Specialist yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada tanggal 7-9 November 2023 dan 16 November 2023.
2	Pelaksanaan dokumen perencanaan kinerja	Terlaksana	Pelaksanaan perencanaan kinerja hingga triwulan IV dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa perencanaan kinerja yang sempat tertunda ataupun perencanaan kinerja yang diubah dengan menyesuaikan timeline yang ada
3	Pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Terlaksana	Pelaksanaan anggaran hingga triwulan IV telah berjalan dengan baik, meskipun sempat terdapat beberapa perencanaan kinerja yang tertunda ataupun berubah

Selain beberapa kegiatan yang menunjang tercapainya *capacity development* dan *talent center* di atas, adapun beberapa kegiatan pengembangan kemampuan dan kapasitas yang diadakan untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, diantaranya

1. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK mengirimkan perwakilan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Dasar Dasar AMDAL dan ESIA dengan jumlah peserta 1 orang yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM pada tanggal 23-27 Oktober 2023
2. Bimbingan Teknis Aplikasi KEK pada KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali dengan jumlah peserta 42 orang yang terdiri dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Kepala Administrator dan Staf Administrator KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali, PT Hotel Indonesia Natour selaku Badan Usaha KEK Sanur, PT Bali Turtle Island Development selaku Badan Usaha KEK Kura Kura Bali, dan Pelaku Usaha di KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali pada tanggal 3-4 November 2023
3. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK mengirimkan perwakilan pegawai untuk mengikuti kegiatan Certified Procurement Specialist dengan jumlah peserta 3 orang yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada tanggal 7-9 November 2023 dan 16 November 2023
4. Sosialisasi Manfaat Program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK pada tanggal 1 Desember 2023

Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus diambil dari penilaian terkait dengan aspek kepuasan penyelenggaraan layanan yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, mulai dari Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus, Biro Investasi, Kerja Sama, dan Organisasi, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, serta Biro Umum dan Keuangan. Survei penilaian dilakukan pada berbagai aspek, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana, komunikasi dan hubungan kerja, pengembangan diri, serta pemahaman organisasi dan berorganisasi.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, rata-rata pelayanan dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memiliki nilai yang baik. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian yang didapatkan, mulai dari penilaian sarana prasarana dengan nilai 3,27 dari skala 4,00 atau sekitar 81,75%, kemudian penilaian komunikasi dan hubungan kerja dengan nilai 3,09 dari skala 4,00 atau sekitar 77,25%, penilaian pengembangan diri dengan nilai 2,91 dari skala 4,00 atau sekitar 72,75%, serta penilaian terkait pemahaman organisasi dan berorganisasi dengan nilai 3,09 dari skala 4,00 atau sekitar 77,25%.



Gambar 5. Grafik Penilaian Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dalam memberikan kelancaran setiap kegiatan yang terselenggara di Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, kebutuhan layanan dukungan manajemen internal meliputi pelaksanaan tata usaha Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, layanan kerumahtanggaan, pengelolaan aset, layanan persidangan, dan lain sebagainya.

Layanan dukungan manajemen internal dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan survei evaluasi layanan dukungan manajemen internal, utamanya yang berhubungan dengan layanan ketersediaan peralatan kantor dan menyusun laporan hasil survei evaluasi layanan manajemen internal yang merupakan survei lanjutan setelah kegiatan pengadaan barang. Selain itu, dilakukan pula kegiatan tindak lanjut pada hasil survei evaluasi layanan manajemen internal, yang dilaksanakan melalui survei manfaat setelah ketersediaan fasilitas. Melalui berbagai hal tersebut, dalam Triwulan IV ini telah terkumpul hasil survei layanan manajemen internal.

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mengupayakan terciptanya lingkungan yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan layanan perkantoran. Upaya tersebut meliputi pembayaran gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan kantor. Hal ini termasuk ke kebutuhan perkantoran seperti sarana dan prasarana internal kantor.

Pelaksanaan layanan perkantoran dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan survei evaluasi layanan perkantoran, yang dilaksanakan melalui survei pemenuhan fasilitas layanan perkantoran dan melalui kegiatan penyusunan laporan hasil survei evaluasi layanan perkantoran yang

berupa survei lanjutan setelah pemenuhan fasilitas layanan perkantoran. Selain itu, dilakukan pula tindak lanjut terkait dengan hasil survei evaluasi layanan perkantoran, dimana hal tersebut dilihat melalui survei manfaat setelah ketersediaan fasilitas.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja layanan perkantoran, sudah dilakukan sedang berlangsung project pengadaan website dengan NBS, telah selesai penataan arsip yang dilakukan oleh Pusat Jasa ANRI, serta telah berlangsung perluasan Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dengan PT AI dan MNC Land. Selain itu, dalam rangka peningkatan kepuasan layanan perkantoran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang lebih baik, bagian rumah tangga telah menyediakan kebutuhan ATK, serta layanan administrasi secara maksimal.

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK tidak terbatas pada alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan, tetapi juga dilakukan pendayagunaan sistem dan data informasi untuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, dimana telah dilakukan penyusunan dan penetapan vendor pembentuk website KEK, dilakukan penambahan dan perubahan data Kepala Administrator KEK pada OSS, serta penyampaian peta lokasi KEK untuk penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di lokasi KEK melalui OSS.

Beberapa upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yaitu pengembangan organisasi dan formasi jabatan, standar dan prosedur kelembagaan dan tata laksana organisasi, penyusunan dokumen manajemen organisasi dan ketatalaksanaan. Hingga Triwulan IV Tahun 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK terus berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan persiapan pengawasan kelembagaan. Hal tersebut terlihat dengan telah dilaksanakannya kegiatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK, antara lain Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Pranata Humas, Sumber Daya Manusia Aparatur, Arsiparis, Perencana, Analisis Hukum, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN, Pranata Komputer, serta Analisis Anggaran. Selain itu, dilakukan pula pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Badan Usaha dan Administrator KEK yang telah terlaksana sebagian dalam hal proses pengisian formasi khususnya di Administrator KEK.

Tidak hanya terbatas pada pengembangan organisasi dan formasi jabatan, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional juga dilakukan melalui Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Nomor KP.03.01/01/SJ DNKEK/CASN/09/2023) pada tanggal 18 September 2023. Selain itu, dilakukan pula beberapa pelantikan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, diantaranya yaitu,

1. Pelantikan Jabatan Fungsional sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Umum ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Jenjang Ahli Pertama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus pada tanggal 20 Desember 2023
2. Pelantikan Jabatan Fungsional sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Umum ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Jenjang Ahli Pertama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus pada tanggal 27 Desember 2023

Tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program kegiatan dengan baik. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung pula dengan sistem pengawasan internal yang efektif. Pada fungsi pelaksanaan pengawasan internal, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK memiliki kewajiban untuk melakukan audit kinerja internal organisasi. Dokumen IKU ini memiliki peran sebagai instrumen monitoring dan kendali organisasi agar mampu mencapai tujuan atau target dari suatu organisasi bagi keseluruhan unit atau biro. Nantinya *breakdown* dari IKU ini adalah mencakup SKP untuk masing-masing pegawai, yang dalam implementasinya akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan pengawasan internal serta pembentukan laporan kinerja pengawasan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK terus berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan persiapan pengawasan kelembagaan. Hal tersebut terlihat bahwa hingga saat ini telah dilakukan penyusunan Persekjen tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, pada triwulan ini juga telah disusun Piagam Pengawasan Intern, Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2023, Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), perjalanan dinas ke Provinsi Riau, Bali, Banten dan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kepulauan Riau yaitu di KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic, dan KEK Galang Batang. Kemudian pemeriksaan BPK di Bali diadakan di KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali, pemeriksaan BPK di Banten yaitu KEK Tanjung Lesung, serta pemeriksaan BPK di Jawa Tengah yaitu di KEK Kendal.



Gambar 6. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) TA 2023

Pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus hingga Desember 2023, adalah sebesar Rp 57.700.274.990,00 atau sebesar 99,53% dari total anggaran yang diberikan, yaitu Rp 57.971.763.000,00. Total anggaran tersebut terbagi dalam berbagai kegiatan, diantaranya Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dengan serapan anggaran sebesar Rp 24.635.327.552,00 atau sebesar 99,23% dari total anggaran yang diberikan, yaitu Rp 24.835.908.000,00; Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK dengan serapan anggaran sebesar Rp 3.522.186.410,00 atau sekitar 99% dari total anggaran yang diberikan, yaitu Rp 3.550.000.000,00; kemudian serapan anggaran kegiatan Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK adalah sebanyak Rp 8.097.301.783,00 atau sebesar 98,71% dari total anggaran yang diberikan, yaitu Rp 8.100.000.000,00; kegiatan Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK memiliki besar serapan anggaran sebesar Rp 13.678.203.772,00 atau sekitar 99,27% dari total anggaran yang diberikan, yaitu Rp 13.701.000.000,00; sedangkan penyerapan anggaran untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK adalah sebanyak Rp 3.979.107.890,00 atau sebesar 99,36% dari total anggaran yang diberikan, yaitu Rp 4.004.855.000,00; serta untuk kegiatan Koordinasi Peraturan Perundang-undangan, Hukum, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian memiliki serapan anggaran sebesar

Rp 3.779.453.083,00 atau sekitar 99,99% dari total anggaran yang diberikan, yaitu Rp 3.780.000.000,00.



Gambar 7. Perbandingan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) year on year

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Evaluasi dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit Eselon I dan tingkat satuan kerja dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

1. Capaian output variabel ini terdiri atas Capaian Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit Eselon I dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target Indikator

Output Program dan Capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 43,5 persen.

2. Penyerapan anggaran variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 28,6 persen.
3. Efisiensi Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit Eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 18,2%.
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Variabel ini dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 9,7%.

IKU PKPA adalah IKU yang mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup internal Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 Tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, IKU PKPA dihitung menggunakan dua tools, yaitu nilai capaian IKPA dan SMART. Ketentuan perhitungan capaian IKU PKPA sesuai SE-8/MK.1/2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU PKPA untuk Triwulan I sampai dengan III mengacu pada capaian IKPA. Dengan demikian, capaian IKU PKPA untuk Triwulan I sampai dengan III sama dengan nilai IKPA yang disajikan pada OM SPAN sesuai dengan periode.
2. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu Wide (dimana tahun 2020 ditetapkan) yaitu SMART 60% dan IKPA 40%.

Dalam rangka mencapai nilai hijau untuk IKU PKPA, yaitu pada nilai 95,5; diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran yang baik dari Kementerian/Lembaga, unit Eselon I, dan satuan kerja. Semenjak terjadinya pandemi Covid-19, kini IKU PKPA juga mempertimbangkan efisiensi anggaran untuk mendorong inovasi agar target capaian output dapat tercapai dengan anggaran yang seefisien mungkin. Meskipun demikian, dengan mulai redanya pandemi Covid-19, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam perhitungan IKU PKPA dapat dilonggarkan agar kegiatan belanja Kementerian/Lembaga, unit

Eselon I, dan satuan kerja dapat lebih dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang umumnya dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah yang berkaitan dengan SDM, yaitu adanya keterbatasan jumlah SDM terkadang membuat pelayanan sarana prasarana menjadi sedikit terhambat dan kurang optimal. Selain itu terdapat pula perubahan arahan pimpinan yang bersifat dinamis, adanya penerapan mekanisme baru dalam melakukan penyusunan perencanaan anggaran, ataupun masih kurang tersedianya pelatihan atau pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang dimiliki.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2023 tersebut, maka disusunlah beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah melakukan penambahan SDM yang sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan di Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan dan realisasi anggaran juga dilakukan secara berkala, untuk menyesuaikan kegiatan serta serapan anggaran, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran bisa tetap berjalan dengan penyesuaian rencana dan timeline kegiatan pelaksanaan. Sedangkan pada kendala peningkatan kompetensi pegawai, dapat dilakukan kerjasama penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai dengan Instansi/Kementerian/Lembaga lain yang terkait.

Jakarta, Januari 2024
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus



Susiwijono Moegiarso
NIP.196907071989121001